



**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022. Sehubungan hal tersebut penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2022 Triwulan II.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga target capaian yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai harapan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin.

Sumedang, 2022
Kepala ~~Badan~~ Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang



Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19690315 199901 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang untuk mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022. Sehubungan hal tersebut penyusunan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan Tahun 2022 Triwulan II.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga target capaian yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai harapan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin.

Sumedang, 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang



Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19690315 199901 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA BKAD KABUPATEN SUMEDANG	
	TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	8
	2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset	
	Daerah Kabupaten Sumedang	8
	2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja BKAD	
	Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II	10
	2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
	BKAD	22
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN	
	ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022	29
BAB IV	PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 s/d Triwulan II	13
Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 (Hasil Input SIPD)	35
Tabel 3.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 (Kertas Kerja Excel Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif)	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud, bernomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perubahan BKAD
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Perubahan BKAD
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan BKAD
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan BKAD
 - Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKAD Tahun 2022 Triwulan II
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD
 - Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - Perumusan tujuan dan sasaran
 - Telaahan usulan program dan kegiatan
 - Perumusan kegiatan prioritas
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perubahan BKAD
 - Penyempurnaan rancangan Renja Perubahan BKAD
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perubahan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan
- c. Penyusunan dan Penetapan Renja Perubahan BKAD Tahun 2022
 - Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja BKAD Tahun 2022
 - Asistensi dan Verifikasi Perubahan Dokumen Renja
 - Pengesahan oleh Kepala Daerah
 - Penetapan Renja Perubahan oleh Kepala BKAD

Rencana Kerja Perubahan BKAD Tahun 2022 memuat mengenai rencana kerja perubahan BKAD yang sedang dilaksanakan pada tahun 2022 yang disusun berdasarkan acuan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis BKAD Tahun 2018-2023 serta RKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022, khususnya dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selain itu, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 pun didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan II.

Penyusunan Renja ini pun memiliki kesesuaian dengan Renstra Kementerian Keuangan yaitu dalam hal mendorong efektifitas tata kelola keuangan dan penguatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan.

Perubahan Dokumen Renja yang disusun merupakan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 44. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114);
 45. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
 46. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian dan Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);
 47. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 2);
 48. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 49. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
 50. Keputusan Bupati Sumedang Nomor Tahun 2022 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2022 khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BKAD Kabupaten Sumedang 1 (satu) tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Menjelaskan arah kebijakan yang akan dilaksanakan;
4. Mengetahui peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah;
5. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dengan berbagai pihak.
6. Menjabarkan proses perencanaan sehingga implementasi dari suatu kegiatan akan lebih mudah.
7. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada pejabat dan staf Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang visi dan misi badan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
8. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat dan staf di Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman.
9. Memudahkan pejabat/staf Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA BKAD KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKAD harus menjadi koordinator bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sehingga tercipta tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang diinginkan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, maka perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi BKAD, agar kualitas pelayanan semakin baik.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang**

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Capaian					Realisasi Capaian					Proyeksi Tahun 2022	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP
2	Penetapan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip			B	B	BB	BB	A	B	BB	BB	A	-	A	
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah			96.15	96.25	96.50	97	97.10	93.73	91.17	78.68	-	-	97	
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi			23	25	28	30	33	68.88	57.16	82.43	89.60	-	80	

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja BKAD Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2022, selain mengacu pada Renstra BKAD, juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKAD pada tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, karena hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan BKAD mendatang.

Evaluasi adalah proses penilaian, pengumpulan, dan pengamatan dari berbagai macam data untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu pelaksanaan program, kegiatan atau proses. Sehingga evaluasi sangat penting untuk dilaksanakan guna mengetahui capaian kinerja atau realisasi kinerja pada suatu instansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi internal monitoring dan evaluasi rencana aksi capaian kinerja BKAD telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja BKAD Kabupaten Sumedang periode sampai dengan Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Berkenaan dengan target penyerapan anggaran pada sekretariat sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 77.093.916.468 baru terealisasi sebesar Rp. 29.341.230.891 atau sebesar 38,06%. Dari capaian tersebut ada beberapa sub kegiatan yang capaiannya masih rendah diantaranya:

- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 48,43%;
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 44,64%;
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6,55%; dan
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 48,84%.

Selain empat sub kegiatan diatas penyerapannya masih rendah, terdapat tiga sub kegiatan yang belum menyerap anggarannya, yaitu:

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

B. BIDANG ANGGARAN

Target penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 1.295.588.100 baru terealisasi sebesar Rp. 456.137.477 atau sebesar 35,21%. Dari capaian tersebut ada beberapa sub kegiatan yang capaiannya masih rendah diantaranya:

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 9,47%;
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 49,63%; dan
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 18,05%.

Selain tiga sub kegiatan diatas penyerapannya masih rendah, terdapat tiga sub kegiatan yang belum menyerap anggarannya, yaitu:

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; dan
- Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.

C. BIDANG PERBENDAHARAAN

Target penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 549.042.010 baru terealisasi sebesar Rp. 312.170.870 atau sebesar 56,86%. Dari capaian tersebut hanya ada satu sub kegiatan yang capaiannya dibawah 50% yaitu Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebesar 46,31%

D. BIDANG AKUNTANSI

Target penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 499.939.780 baru terealisasi sebesar Rp. 244.499.010 atau sebesar 48,91%. Dari capaian tersebut terdapat empat sub kegiatan yang belum terrealisasi anggarannya yaitu:

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
- Sub kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota; dan
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.

E. BIDANG ASET

Target penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 1.116.400.000 baru terealisasi sebesar Rp. 480.233.710 atau sebesar 43,02%. Dari capaian tersebut masih banyak sub kegiatan yang capaiannya masih dibawah 50%, hanya ada empat sub kegiatan yang penyerapannya sudah diatas 50% yaitu:

- Sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah sebesar 66,20%;
- Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 74,53%
- Sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebesar 77,53%; dan
- Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota sebesar 95,81%.

Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Keterangan
				7			8		9		10			
				K	Rp	Persentase	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	95	945,011,800	100	67,938,627	100	547,023,013	100	614,961,640	BKAD		
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penggangan Ketepatan Waktu Proses Penggangan Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	10 0	1,317,488,200	0	158,575,750	-						
A		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD Dokumen pengendalian Anggaran Dokumen Perencanaan Penggangan	95	730,700,000	81.82	186,532,700	34.56						
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	9	945,011,800		67,938,627		158,778,999	0	226,717,626	BKAD		
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	14	1,317,488,200	25%	158,575,750		241,731,388	0	400,307,138	BKAD		
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Validasi RKA SKPD	2	191,770,000	25%	5,701,657	25%	44,089,219	0.25	49,790,876	BKAD		
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2	140,978,600		-	25%	2,830,000	0	2,830,000	BKAD		
5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Validasi RKA SKPD	1	128,742,600		-		-	-	-	BKAD		
			Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	1	127,606,500	25%	79,057,850	25%	10,460,000	0.5	89,517,850	BKAD	Telah dilaksanakan Pergeseran Anggaran	
			Jumlah Validasi DPA SKPD	1	97,669,000	25%	28,750,000	25%	1,430,000	0	30,180,000	BKAD	Telah dilaksanakan Pergeseran Anggaran	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perang kat Daerah Penang g Jawab	Keterangan
				7		8		9		10			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	1	124,370,100	25%	7,400,000	25%	65,935,300	0.5	73,335,300	BKAD	
6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen								
7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD	2	Dokumen								
8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	6	Dokumen	1	62,236,970	1	111,859,780	2	174,096,750	BKAD	Sudah Terealisasi 1 dokumen
9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	4	Dokumen	1	43,367,900	1	93,221,088	2	136,588,988	BKAD	Sudah Terealisasi 1 dokumen
10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi	1	Dokumen			25%	70,685,000	0	70,685,000	BKAD	
11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	1	Dokumen							BKAD	
12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembiayaan	0	Dokumen							BKAD	
13		Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah	1	Dokumen							BKAD	
B		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12	Dokumen	10.1	87,278,100		252,042,770	-	339,320,870	BKAD	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Keterangan
				7		8		9		10			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4										
14	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2	Dokumen	221,418,870	25%	9,976,550	25%	90,799,260	1	100,775,810	BKAD	
15	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2	Dokumen	34,566,920		-			-		BKAD	
16	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3	Dokumen	74,909,250	25%	7,335,850	25%	34,023,000	1	41,358,850	BKAD	
17	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	Dokumen	-					-		BKAD	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangk at Daerah Penang g Jawab	Keterangan	
				7		8		9		10				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	2	326,887,500	25%	49,558,700	25%	74,430,050	1	123,988,750	BKAD		
18		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen										
19		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	-	25%	20,407,000		52,790,460	0	73,197,460	BKAD		
20		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1	173,317,460							BKAD		
C		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	2	501,008,370		141,919,910		136,201,244	-	278,121,154	BKAD		
				4	229,691,630		44,612,790		111,298,340					

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Keterangan
				7		8		9		10			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4										
21		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2	48,303,880	2	12,123,970	25%	11,904,970	2	24,028,940	BKAD	Sudah Terealisasi 2 jenis laporan
22		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3	57,723,020	3	16,568,520	25%	13,007,390	3	29,575,910	BKAD	Sudah Terealisasi 3 jenis laporan
23		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1	92,117,230	25%	15,071,760	25%	15,447,060	1	30,518,820	BKAD	Sudah Terealisasi 2 dokumen
24		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4	127,540,000	2	44,612,790	2	71,442,200	4	116,054,990	BKAD	
25		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	87,775,990	-	-	2	33,129,020	2	33,129,020	BKAD	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Keterangan
				7		8		9		10			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4										
26		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	14,375,640		-	25%	6,727,120	0	6,727,120	BKAD	
27		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	-		-		-	-	-	BKAD	
28		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	56,283,250		-	1	52,143,550	1	52,143,550	BKAD	
29		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	-		-		-	-	-	BKAD	
30		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	-		-		-	-	-	BKAD	
31		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1	99,999,950	1	98,155,660	-	-	1	98,155,660	BKAD	
32		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1	40,938,370		-		-	-	-	BKAD	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perang at Daerah Penang g Jawab	Keterangan	
				7			8		9		10					
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4													
33		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	105,642,670	-		25%	43,698,274	0	43,698,274	BKAD			
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12	Dokumen	411,624,401,703	74,504,256,131			123,938,625,150		198,442,881,281				
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2	Dokumen	356,080,726,000	74,089,527,281	20%	25%	108,037,246,280		182,126,773,561		Penyaluran dana Bantuan keuangan		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2	Dokumen	26,056,380,703	414,728,850	5%		1,158,095,370		1,572,824,220				
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	Dokumen	29,487,295,000	-		50%	14,743,283,500		14,743,283,500				
D		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data lingkup keuangan daerah	-	-	-	-			-		-	BKAD			
34		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	-	-	-			-	0	-	BKAD			
II		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas)	90	Persen	1,213,100,000	209,281,450	98.18				209,281,450	BKAD			
E		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	26	Dokumen	1,213,100,000	209,281,450					209,281,450	BKAD			
35		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	202,912,000	5,683,100	25%	25%	158,581,230	1	164,264,330	BKAD	Pengumpulan dan Pengolahan data		

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Renja Peringkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perang at Daerah Penang g Jawab	Keterangan
				7		8		9		10			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4										
36		Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-							BKAD	
37		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	19,955,000							BKAD	
38		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	70,000,000	1	8,765,000	20%	23,200,000	1	31,965,000	BKAD	
39		Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	165,437,000	25%	12,244,950	25%	55,930,000	1	68,174,950	BKAD	
40		Inventarisasi barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	45,200,000	25%	10,896,700	25%	11,597,000	1	22,493,700	BKAD	
41		Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	309,681,000	30%	37,411,200	25%	75,173,680	1	112,584,880	BKAD	Terbitnya peta bidang tanah
42		penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	69,500,000	25%	9,000,000	25%	15,318,600	1	24,318,600	BKAD	Survey penilaian rehab gedung
43		Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	79,500,000	25%	31,500,000	25%	23,933,300	1	55,433,300	BKAD	
44		Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Daerah Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	3	135,135,000	25%	17,875,000	25%	17,999,750	1	35,874,750	BKAD	Survey lokasi

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Keterangan		
				7		8		9					10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp
1	2	3	4	1	59,350,000	25%	21,840,000	25%	25,485,500	0.25	47,325,500	BKAD	Pelaksanaan Rekon tiap bulan	
45		Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	25%	21,840,000	25%	25,485,500	0.25	47,325,500	BKAD	Pelaksanaan Rekon tiap bulan	
46		Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Dokumen	-	-	-	-	0	-	BKAD		
47		pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	54,065,500	0	-	1	54,065,500	BKAD		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
 5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2022 mempunyai target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan realisasi WTP untuk laporan keuangan tahun 2021. Sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama Penetapan APBD dari yang ditargetkan "Tepat Waktu" telah terrealisasi pada tahun 2021.

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BKAD Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya dalam upaya memenuhi target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah selama Tahun 2021 masih mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset bersifat dinamis;
2. Adanya pergantian petugas pengelola keuangan dan aset pada SKPD mengakibatkan hasil pekerjaan kurang optimal;
3. Struktur APBD belum ideal;
4. Implementasi Akuntansi berbasis Akrual belum optimal;
5. Penatausahaan aset daerah belum optimal

- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals) bahwa visi dan misi kepala daerah dapat mendukung program nasional sebagaimana dimaksud diatas, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan dukungan dari kabupaten/kota.

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strengths)

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;

Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.

3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
Dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 60 orang telah dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;
Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai merupakan modal dasar yang potensial dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama seluruh stakeholder.
5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BKAD.
Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelemahan (*weakness*)

1. Kualitas SDM masih belum memadai;
Meskipun dari segi jumlah sudah memadai, namun untuk kompetensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga mempunyai SDM yang kompeten dan profesional.
2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;
Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sistem Aplikasi SIPD dan SIPASTI masih belum terintegrasi sehingga pengelolaan keuangann dan aset daerah membutuhkan waktu yang cukup lama.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. *Peluang (Opportunities)*

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang penting, sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang memadai. Diantara peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini BPK terhadap laporan keuangan yaitu WTP. Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan peran serta bersama seluruh SKPD.

1. Penggunaan teknologi informasi yang memadai.

Sistem informasi dibutuhkan dalam manajemen perkantoran untuk menjalankan aktivitas, seperti mengolah data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang berguna. Diantara teknologi informasi yang dipakai berupa aplikasi yaitu SIPD dan SIPASTI.

b. Ancaman (Threats)

1. Koordinasi antar dinas belum memadai.

Masih terdapat kendala dalam proses koordinasi dengan dinas, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu penyampaian dokumen keuangan. Diantara dokumen keuangan dimaksud yaitu SPP/SPM, laporan rekonsiliasi, laporan pertanggungjawaban, dll.

2. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut dapat berdampak buruk, karena bisa menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.

4. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersifat dinamis.

Hal ini menjadi kendala ketika APBD sudah ditetapkan, tetapi kemudian harus mengalami perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD karena adanya regulasi yang bersifat dinamis.

- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	Strategi Kd I : <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	K E L E M A H A N	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/ *strengths*, kelemahan/ *weaknesses*, peluang/ *opportunities*, dan tantangan/ *threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

**ANALISA SWOT
ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL**

<p>Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: right;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Penggunaan teknologi informasi yang memadai. 	<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar dinas belum memadai. 2. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah. 4. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersifat dinamis.
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik; 5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BKAD. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Baik. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Koordinasi antar OPD Terkait Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan; 2. Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah; 3. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu Adanya Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah; 2. Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program-program Pelatihan dan Sertifikasi.

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BKAD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Peningkatan pelaporan keuangan aset daerah yang lebih baik;
2. Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;

3. Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;

Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pelatihan dan sertifikasi.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang dinyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan

pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

KREATIF masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickel-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat”** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan **Tujuan** yang merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sebagai berikut:

" Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan "

Tujuan BKAD mengandung makna yang sangat jelas yaitu bahwa harus dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Akuntabilitas kinerja dan keuangan harus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian misi ke 4 yaitu menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Gambaran secara garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2022 dengan jumlah 3 Program, 13 Kegiatan (8 Adum dan 5 Urusan) dan 69 (27 Adum dan 42 Urusan) Sub Kegiatan. Berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2022 rincian daftar program, kegiatan dan sub kegiatan bisa dilihat sebagai berikut:

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 12) Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 5) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
 - 6) Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 7) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 8) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
 - 9) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 4) Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
- C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1) Penyusunan Standar Harga
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 6) Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 7) Penilaian Barang Milik Daerah
 - 8) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 9) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 10) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 11) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan usulan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada RKPD Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
5 0 0 2 0 0 2 0 1 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	9 Dokumen	9 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	140.000.000	190.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	155.000.000
5 0 0 2 1 0 2 1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									129.057.306,177	129.057.306,177					78.037.479,683
5 0 0 2 0 1 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	128.962.306,177	128.962.306,177	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	77.792.479,683
5 0 0 2 0 1 2 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	24 Laporan	24 Laporan	95.000.000	95.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	185.000.000
5 0 0 2 1 0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									256.530.000	256.530.000					175.160.000
5 0 0 2 0 1 3 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	256.530.000	256.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	175.160.000
5 0 0 2 1 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									241.060.000	241.060.000					467.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Hasil Kegiatan				Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
50020152	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Stel	110 Stel	14 Laporan	14 Laporan	102,860,000	102,860,000	100 %	200,000,000	
50020153	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian yang memadai	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	35,000,000	35,000,000	100 %	70,000,000	
50020151	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 orang	100 orang	14 Laporan	14 Laporan	103,200,000	103,200,000	100 %	197,200,000	
5002106	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,159,476,000	1,699,936,000		1,725,000,000	
50020162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	4 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	212,547,000	289,077,000	100 %	250,000,000	
50020163	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	45,000,000	45,000,000	100 %	60,000,000	
50020164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran/Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	200,000,000	240,000,000	100 %	190,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	
50020165	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran/Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	56 Laporan	12 Laporan	56 Laporan	100 %	128,109,000	202,039,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	275,000,000
50020166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	56 Laporan	12 Laporan	56 Laporan	100 %	32,820,000	32,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	40,000,000
50020169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	56 Laporan	12 Laporan	56 Laporan	100 %	350,000,000	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	600,000,000
50020160	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	56 Laporan	2 Laporan	56 Laporan	100 %	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	60,000,000
50020161	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	56 Laporan	1 Laporan	56 Laporan	100 %	176,000,000	176,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 %	250,000,000
5002107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						331,530,000					331,530,000	1,644,350,000				1,085,000,000
50020171	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Memadai	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	2 unit	25 Unit				0	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Memadai	100 %	700,000,000

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5 0 0 2 0 0 5 2 1 7 5	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Mebel	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	5 Unit	25 Unit	25 Unit	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	110,000,000	
5 0 0 2 0 0 5 2 1 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	20 Unit	25 Unit	25 Unit	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	275,000,000	
5 0 0 2 0 0 5 2 1 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang memadai									1,690,590,000	1,690,590,000			2,311,000,000	
5 0 0 2 0 0 5 2 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	711,000,000	
5 0 0 2 0 0 5 2 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	1,500,000,000	
5 0 0 2 0 0 5 2 1 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang memadai									458,940,000	872,450,000			930,000,000	
5 0 0 2 0 0 5 2 1 9 2	Pemeliharaan Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 %	285,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
5002002196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	1 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	353.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	90.000.000	
5002002199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	1 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	22.630.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	175.000.000	
5002002190	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	2 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	163.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 %	350.000.000	
50020022	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								415.448.701.703				59.340.000.000	
500200201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								2.262.500.000				3.580.000.000	
500200211	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran	100 % 95 %	2 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	201.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	275.000.000	
500200212	Koordinasi dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran	100 % 95 %	2 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	150.978.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	275.000.000	
500200213	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Validasi RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran	100 % 95 %	1 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	138.742.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	175.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja				Rencana Tahun 2022		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target
5002002214	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan perencanaan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	200,000,000	
5002002215	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Validasi DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan perencanaan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	180,000,000	
5002002216	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan perencanaan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	175,000,000	
5002002217	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen APBD	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan perencanaan Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	2 Dokumen	2 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	350,000,000	
5002002218	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan perencanaan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	6 Dokumen	6 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	550,000,000	
5002002219	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan dan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan perencanaan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	4 Dokumen	4 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	450,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan		Program		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
50020102010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	78.624.000	78.624.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	150.000.000
50020102011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	218.167.000	318.717.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	400.000.000
50020102013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Jumlah pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 95 %	100 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	18 Dokumen	18 Dokumen	95.300.000	215.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Ketepatan Waktu Proses Penganggaran Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	100 % 95 %	400.000.000
50020202020	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											831.100.000	1.142.219.300				2.250.000.000	
50020202021	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	221.418.870	245.418.870	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	500.000.000
50020202023	Penyusunan, Pelaksanaan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Validasi RAK Murni, Perubahan dan Jumlah Perkiraan Pengeluaran Kas Daerah, dan Jumlah Penerbitan SPD	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	34.566.920	34.566.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	350.000.000
50020202025	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Jumlah Koordinasi Laporan Konfirmasi Transfer/rekonsiliasi dana spesifik dan penyaluran dana spesifik (DAU)	Tersedianya Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	74.909.250	137.345.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	95 %	350.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbup LPP APBD	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
5002020203	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbup LPP APBD	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawab Anggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	87.775.990	87.775.990	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95 %	250.000.000
5002020306	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Laporan Tindak Lanjut BPK	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawab Anggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	14.375.640	14.375.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95 %	50.000.000
50020308	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawab Anggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	56.283.250	56.283.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95 %	150.000.000
50020311	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawab Anggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	99.999.950	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95 %	400.000.000
50020312	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawab Anggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	40.938.370	40.938.370	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95 %	100.000.000
50020333	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawab Anggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	105.642.670	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD dan LKOPD	95 %	250.000.000
500204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										411.624.401,703	403.844,169,128				50.810.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Indikator Kinerja					Target Capaian Kinerja						Sumber Dana	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum				
50020020020047	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah laporan hasil penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		95 %	1 Laporan	12 Dokumen	95 %	12 Dokumen	12 Dokumen	0	810,000,000	95 %	810,000,000
50020020020048	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah laporan Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		95 %	2 Laporan	12 Dokumen	95 %	12 Dokumen	12 Dokumen	356,080,726,000	356,080,726,000	95 %	0
50020020020049	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	2 Laporan	12 Dokumen	95 %	12 Dokumen	12 Dokumen	26,056,380,703	17,466,148,128	95 %	50,000,000,000
50020020020050	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	4 Laporan	12 Dokumen	95 %	12 Dokumen	12 Dokumen	29,487,295,000	29,487,295,000	95 %	0
50020020020051	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
50020020020052	Pengelolaan Barang Milik Daerah														
50020020020053	Penyusunan Perencanaan Standar Harga	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materalitas)	Jumlah Satuan Standar Harga	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	26 Dokumen	90 %	26 Dokumen	26 Dokumen	202,912,000	227,912,000	90 %	525,000,000
50020020020054	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materalitas)	Jumlah RKBMD dan RKP8MD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Dokumen	26 Dokumen	90 %	26 Dokumen	26 Dokumen	19,955,000	44,955,000	90 %	30,000,000
											1,213,100,000	2,558,100,000			2,379,250,000
											1,213,100,000	2,558,100,000			2,379,250,000

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
50020314	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 %	4 Dokumen	4 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	70,000,000	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	90 %	105,000,000
50020315	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 %	4 Dokumen	4 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	165,437,000	305,437,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	90 %	210,000,000
50020316	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	Jumlah Inventarisasi BMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	45,200,000	45,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	90 %	75,000,000
50020317	Pengamanan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	Jumlah BMD yang diamankan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	309,681,000	1,009,681,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	90 %	400,000,000
50020318	Penilaian Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	Jumlah BA Penilaian BMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	69,500,000	144,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	90 %	232,500,000
50020319	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	Jumlah BA Pengawasan Pengendalian dan Pengelolaan BMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	79,500,000	79,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	90 %	119,250,000
50020310	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	Jumlah Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 %	3 Dokumen	3 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	135,135,000	265,135,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	90 %	217,500,000
50020311	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	Jumlah Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	59,350,000	109,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materiilitas)	90 %	150,000,000

Tabel 3.2
Rencana Kerja Dan Pendanaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	KETERANGAN
		Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPJ/ RENJA Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 - 5)		
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang		133,474,056,177	Kab. Sumedang		135,815,846,177	2,341,790,000	APBD KABUPATEN	Usulan Pergeseran/ tambahan Aktivitas Sub Kegiatan/ Tambahan Pagu 11
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang		278,624,000	Kab. Sumedang		353,624,000	75,000,000.00	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	11 Dokumen	98,624,000	Kab. Sumedang	11 Dokumen	123,624,000	25,000,000.00	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.01 02	Delegasi Forum Musrenbang Kabupaten, Forum SKPD, Penyusunan KAK, Penyusunan KAK Perubahan, Penyusunan Renja Perubahan SKPD, Penyusunan Renja SKPD, Pra Forum, Ranwal Renja, Reviu Renstra SKPD, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Profil									
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sumedang	2 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang	2 Dokumen	20,000,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.01 04	Penyusunan RKA, Penyusunan RKA P-APBD									
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sumedang	2 Dokumen	20,000,000	Kab. Sumedang	2 Dokumen	20,000,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.01 06	Penyusunan DPA, Penyusunan DPPA									
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sumedang	9 Dokumen	140,000,000	Kab. Sumedang	9 Dokumen	190,000,000	50,000,000.00	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 01 2.01 06	Penyusunan Laporan Ikhtisar Manajemen Risiko, Laporan Realisasi, SAKIP, RB dan Zi, LKIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPIP									
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sumedang		129,057,306,177	Kab. Sumedang		129,057,306,177	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sumedang	12 Laporan	128,962,306,177	Kab. Sumedang	12 Laporan	128,962,306,177	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sumedang	12 Dokumen	95,000,000	Kab. Sumedang	12 Dokumen	95,000,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sumedang		256,530,000	Kab. Sumedang		256,530,000	-	APBD KABUPATEN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN	
		Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPD/ RENJA Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8 - 5)		
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sumedang	1 Laporan	256,530,000	Kab. Sumedang	1 Laporan	256,530,000	-	APBD KABUPATEN	Usulan Pergeseran/ tambahan Aktivitas Sub Kegiatan/ Tambahan Tambahan Pagu
5 02 01 2.05	<i>Sewa gudang arsip dan barang inventaris</i> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	100 Stel	241,060,000	Kab. Sumedang	100 Stel	241,060,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sumedang	100 Stel	102,860,000	Kab. Sumedang	100 Stel	102,860,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.05 03	Pakaian Dinas Harian	Kab. Sumedang	4 Laporan	35,000,000	Kab. Sumedang	4 Laporan	35,000,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.05 11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian <i>Laporan Administrasi Kepegawaian</i>	Kab. Sumedang	100 Orang	103,200,000	Kab. Sumedang	100 Orang	103,200,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan <i>Honorarium Pembawa Acara, Penceramah, media, honorarium instruktur senam, bimbingan teknis aparatur</i>	Kab. Sumedang	4 Laporan	1,159,476,000	Kab. Sumedang	4 Laporan	1,699,936,000	540,460,000	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.06 02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	4 Laporan	212,547,000	Kab. Sumedang	4 Laporan	289,077,000	76,530,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <i>Belanja ATK Belanja Kertas/Cover Belanja Bahan Komputer Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</i>	Kab. Sumedang	1 Laporan	45,000,000	Kab. Sumedang	1 Laporan	45,000,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga <i>Belanja alat dan bahan rumah tangga kantor, Belanja Bahan-Isi Tabung Gas, belanja penggantian, belanja alat dan bahan rumah tangga kantor</i>	Kab. Sumedang	4 Laporan	200,000,000	Kab. Sumedang	4 Laporan	240,000,000	40,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor <i>Belanja Bahan Logistik Belanja Mamin Rapat Belanja Mamin Jamuan Tamu</i>	Kab. Sumedang	12 Laporan	128,109,000	Kab. Sumedang	12 Laporan	202,039,000	73,930,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan <i>Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja Cetak Belanja Pengandaan belanja Publikasi Iklan</i>	Kab. Sumedang	12 Laporan	32,820,000	Kab. Sumedang	12 Laporan	32,820,000	-	APBD KABUPATEN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN	
		Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPD/ RENJA Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8 - 5)	10	11
5 02 01	09	Kab. Sumedang	12 Laporan	350,000,000	Kab. Sumedang	12 Laporan	700,000,000	350,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 01	10	Kab. Sumedang	2 Laporan	15,000,000	Kab. Sumedang	2 Laporan	15,000,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01	11	Kab. Sumedang	1 Laporan	176,000,000	Kab. Sumedang	1 Laporan	176,000,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01	2.07	Kab. Sumedang		331,530,000	Kab. Sumedang		1,644,350,000	1,312,820,000	APBD KABUPATEN	
5 02 01	2.07	Kab. Sumedang	-	-	Kab. Sumedang	2 Unit	700,000,000	700,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Sub Kegiatan Baru
5 02 01	2.07	Kab. Sumedang	5 Unit	250,000,000	Kab. Sumedang	5 Unit	250,000,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01	2.07	Kab. Sumedang	20 Unit	81,530,000	Kab. Sumedang	66 Unit	694,350,000	612,820,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 01	2.08	Kab. Sumedang		1,690,590,000	Kab. Sumedang		1,690,590,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01	2.08	Kab. Sumedang	12 Laporan	239,400,000	Kab. Sumedang	12 Laporan	239,400,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01	2.08	Kab. Sumedang	12 Laporan	1,451,190,000	Kab. Sumedang	12 Laporan	1,451,190,000	-	APBD KABUPATEN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN	
		Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPD/ RENJA Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8 - 5)	10	11
5 02 01	2.09	Kab. Sumedang	1 Laporan	458,940,000	Kab. Sumedang		872,450,000	413,510,000	APBD KABUPATEN	Usulan Pergeseran/ tambahan Aktivitas Sub Kegiatan/ Tambahan Pagu
5 02 01	2.09	Kab. Sumedang	1 Laporan	201,500,000	Kab. Sumedang	1 Laporan	279,740,000	78,240,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 01	2.09	Kab. Sumedang	1 Laporan	71,430,000	Kab. Sumedang	1 Laporan	353,320,000	281,890,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 01	2.09	Kab. Sumedang	1 Laporan	22,630,000	Kab. Sumedang	1 Laporan	22,630,000	-	APBD KABUPATEN	
5 02 01	2.09	Kab. Sumedang	1 Laporan	163,380,000	Kab. Sumedang	1 Laporan	216,760,000	53,380,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02	2.01	Kab. Sumedang	2 Dokumen	406,858,469,128	Kab. Sumedang		409,172,469,558	2,314,000,430	APBD KABUPATEN	
5 02 02	2.01	Kab. Sumedang	2 Dokumen	2,262,500,000	Kab. Sumedang		2,914,404,000	651,904,000	APBD KABUPATEN	
5 02 02	2.01	Kab. Sumedang	2 Dokumen	191,770,000	Kab. Sumedang	2 Dokumen	201,770,000	10,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN	
		Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKP/RENTJA Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8 - 5)	10	11
5 02 02 2.01	Fasilitasi Pembahasan KUA dan PPAS T.A. 2023, Fasilitasi Penyusunan KUA dan PPAS T.A. 2023	Kab. Sumedang	2 Dokumen	140,978,600	Kab. Sumedang	2 Dokumen	150,978,600	10,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Sumedang	1 Dokumen	128,742,600	Kab. Sumedang	1 Dokumen	138,742,600	10,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A. 2022, Fasilitasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A. 2022	Kab. Sumedang	1 Dokumen	127,606,500	Kab. Sumedang	1 Dokumen	192,006,500	64,400,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Sumedang	1 Dokumen	97,669,000	Kab. Sumedang	1 Dokumen	182,069,000	84,400,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Fasilitasi Verifikasi RKA SKPD	Kab. Sumedang	1 Dokumen	124,370,100	Kab. Sumedang	1 Dokumen	188,770,100	64,400,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sumedang	1 Dokumen	127,606,500	Kab. Sumedang	1 Dokumen	192,006,500	64,400,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Fasilitasi Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Kab. Sumedang	1 Dokumen	97,669,000	Kab. Sumedang	1 Dokumen	182,069,000	84,400,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sumedang	1 Dokumen	124,370,100	Kab. Sumedang	1 Dokumen	188,770,100	64,400,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Fasilitasi Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Kab. Sumedang	1 Dokumen	124,370,100	Kab. Sumedang	1 Dokumen	188,770,100	64,400,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Sumedang	2 Dokumen	223,520,000	Kab. Sumedang	2 Dokumen	341,536,000	118,016,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Fasilitasi Evaluasi APBD T.A. 2023, Fasilitasi Pembahasan APBD T.A. 2023, Fasilitasi Penyusunan APBD T.A. 2023	Kab. Sumedang	6 Dokumen	388,743,200	Kab. Sumedang	6 Dokumen	458,881,200	70,138,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Sumedang	4 Dokumen	447,009,000	Kab. Sumedang	4 Dokumen	447,009,000	-	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Fasilitasi Evaluasi APBD T.A. 2022, Fasilitasi Pembahasan Perubahan APBD T.A. 2022, Fasilitasi Penyusunan Perubahan APBD T.A. 2022, Fasilitasi Penyusunan Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2022	Kab. Sumedang	1 Dokumen	78,624,000	Kab. Sumedang	1 Dokumen	78,624,000	-	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Sumedang	1 Dokumen	78,624,000	Kab. Sumedang	1 Dokumen	78,624,000	-	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Pembuatan Audio Visual Perencanaan Penganggaran, Belanja Jasa Pihak Ketiga (Dalam Rangka ASB, Naskah Akademik, SBU, Pembuatan Audio Visual Perencanaan Penganggaran)	Kab. Sumedang	1 Dokumen	78,624,000	Kab. Sumedang	1 Dokumen	78,624,000	-	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Sumedang	1 Dokumen	78,624,000	Kab. Sumedang	1 Dokumen	78,624,000	-	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN	
		Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPD/ RENJA Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8 - 5)	10	11
5 02 02 2.01 11	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Perjalanan Dinas Biasa (Wilayah DKI dan Banten, Wilayah Provinsi Jawa Barat)	Kab. Sumedang	1 Dokumen	218,167,000	Kab. Sumedang	1 Dokumen	318,717,000	100,550,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.01 13	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Sumedang	1 Laporan	95,300,000	Kab. Sumedang	1 Laporan	215,300,000	120,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.02	Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis), Belanja Sewa Gedung Bangunan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Wilayah DKI dan Banten, Wilayah Provinsi Jawa Barat)	Kab. Sumedang	2 Dokumen	831,100,000	Kab. Sumedang	2 Dokumen	1,142,219,300	311,119,300	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Sumedang	2 Dokumen	221,418,870	Kab. Sumedang	2 Dokumen	245,418,870	24,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.02 03	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Sumedang	2 Dokumen	34,566,920	Kab. Sumedang	2 Dokumen	34,566,920	-	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 02 2.02 05	Belanja Makanan dan Minuman (Dalam Rangka Evaluasi Transaksi Non Tunai, Perhitungan SILPA, rekonsiliasi penyaluran dan penggunaan dana desa, sosialisasi kebijakan penyaluran dana transfer ke desa, Verifikasi Perhitungan Uang Persediaan), Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator / Dirigen (Dalam Rangka Evaluasi Transaksi Non Tunai, sosialisasi kebijakan penyaluran dana transfer ke desa), Belanja Lembur (Dalam rangka pemrosesan SP2D)	Kab. Sumedang	3 Dokumen	74,909,250	Kab. Sumedang	3 Dokumen	137,345,550	62,436,300	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN
	Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPD/RENJA Th.2022	Bertambah/ Berkurang			
1	2	Evaluasi Belanja Dana Spesifik, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari Bantuan keuangan Provinsi TA 2022, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK fisik tahap II TA 2022, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK fisik tahap I TA 2022, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK non fisik TA 2021, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK non fisik tahap I TA 2022, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DID tahap I TA 2022, evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DTU semester I TA 2022, rekonsiliasi belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi TA 2021, rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK Fisik TA 2021, rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DID TA 2021, Rekonsiliasi Belanja yang bersumber dari DTU, Fasilitas penyaluran DAK Fisik, fasilitasi penyaluran dana desa	3	4	5	6	7	8	10	Usulan Pergeseran/ tambahan Aktivitas Sub Kegiatan/ Tambahan Tambahan Pagu 11
5 02 02 07	Kab. Sumedang	2 Dokumen	326,887,500	Kab. Sumedang	12 Dokumen	426,887,500	100,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu	
5 02 02 11	Kab. Sumedang	1 Laporan	173,317,460	Kab. Sumedang	55 SKPD	298,000,460	124,683,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu	
5 02 02 2.03	Kab. Sumedang	2 Jenis	730,700,000	Kab. Sumedang	2 Jenis	1,271,677,130	540,977,130.0	APBD KABUPATEN		
5 02 02 01	Kab. Sumedang	2 Jenis	48,303,880	Kab. Sumedang	2 Jenis	48,303,880	-	APBD KABUPATEN		

Kode	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN
	Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPD/ RENJA Th.2022		
1	2	2	5	6	7	8	9 = (8 - 5)	Usulan Pergeseran/ tambahan Aktivitas Sub Kegiatan/ Tambahan Tambahan Pagu
5 02 02 2.03 02	3	4	57,723,020	Kab. Sumedang	48 Dokumen	100,000,000	42,276,980	APBD KABUPATEN
5 02 02 2.03 03	Kab. Sumedang	12 Dokumen	92,117,230	Kab. Sumedang	12 Dokumen	150,000,000	57,882,770	APBD KABUPATEN
5 02 02 2.03 04	Kab. Sumedang	2 Dokumen	127,540,000	Kab. Sumedang	2 Dokumen	324,000,000	196,460,000	APBD KABUPATEN
5 02 02 2.03 05	Kab. Sumedang	4 Dokumen	87,775,990	Kab. Sumedang	4 Dokumen	87,775,990	-	APBD KABUPATEN
5 02 02 2.03 06	Kab. Sumedang	1 Dokumen	14,375,640	Kab. Sumedang	1 Dokumen	14,375,640	-	APBD KABUPATEN
5 02 02 2.03 08	Kab. Sumedang	1 Buku	56,283,250	Kab. Sumedang	1 Buku	56,283,250	-	APBD KABUPATEN
5 02 02 2.03 11	Kab. Sumedang	Petugas Akuntansi	99,999,950	Kab. Sumedang	Petugas Akuntansi	200,000,000	100,000,050	APBD KABUPATEN
5 02 02 2.03 12	Kab. Sumedang	1 Laporan	40,938,370	Kab. Sumedang	1 Laporan	40,938,370	-	APBD KABUPATEN
							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN
		Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPD/ RENJA Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8 - 5)	11
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Sumedang	2 Dokumen	105,642,670	Kab. Sumedang	2 Dokumen	250,000,000	APBD KABUPATEN	Uslan Pergeseran/ tambahan Aktivitas Sub Kegiatan/ Tambahan Tambahan Pagu
	<i>Dokumentasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, Aplikasi Klinik Akuntansi, Penyusunan Profil Keuangan Daerah</i>								
5 02 02 2.04 02	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sumedang	-	403,034,169,128	Kab. Sumedang	1 Dokumen	810,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Sub Kegiatan
5 02 02 2.04 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kab. Sumedang	-	-	Kab. Sumedang	1 Dokumen	810,000,000	APBD KABUPATEN	
	<i>Alokasi Anggaran Subsidi Bunga KURDA</i>								
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Sumedang	2 Laporan	356,080,726,000	Kab. Sumedang	2 Laporan	356,080,726,000	APBD KABUPATEN	
	<i>Alokasi Dana Desa Dana Desa Bankeu Khusus</i>								
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Sumedang	2 Laporan	17,466,148,128	Kab. Sumedang	2 Laporan	17,466,148,128	APBD KABUPATEN	
	<i>Belanja Tidak Terduga (Kesehatan) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga(Pajak Rokok)</i>								
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	4 Laporan	29,487,295,000	Kab. Sumedang	4 Laporan	29,487,295,000	APBD KABUPATEN	
	<i>Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa</i>								
5 02 03 2.01 01	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	1,213,100,000	Kab. Sumedang	100%	2,558,100,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
5 02 03 2.01 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	1,213,100,000	Kab. Sumedang	100%	2,558,100,000	APBD KABUPATEN	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Sumedang	100%	202,912,000	Kab. Sumedang	100%	227,912,000	APBD KABUPATEN	
	<i>Akomodasi untuk tim pengadaan barang jasa dan belanja cetak</i>								
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	19,955,000	Kab. Sumedang	100%	44,955,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
	<i>Penyusunan Kebutuhan perubahan</i>								
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	70,000,000	Kab. Sumedang	100%	70,000,000	APBD KABUPATEN	
	<i>Kejasama dengan kejaksanaan</i>								

Kode	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			SUMBER DANA	KETERANGAN	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Anggaran dalam APBD Tahun 2022 (Pergeseran Terakhir)	Lokasi	Target	Usulan Pagu Perubahan RKPd/ RENJA Th.2022			Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8 - 5)	11	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	165,437,000	Kab. Sumedang	100%	305,437,000	140,000,000	APBD KABUPATEN	Usulan Pergeseran/ tambahan Aktivitas Sub Kegiatan/ Tambahan Tambahan Pagu
	<i>Belanja Jasa konsultasi</i>									
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	45,200,000	Kab. Sumedang	100%	45,200,000	-	APBD KABUPATEN	
	<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>									
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	309,681,000	Kab. Sumedang	100%	1,009,681,000	700,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
	<i>Honorarium Tim pengukuran</i>									
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	69,500,000	Kab. Sumedang	100%	144,500,000	75,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
	<i>Belanja Jasa konsultasi</i>									
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	79,500,000	Kab. Sumedang	100%	79,500,000	-	APBD KABUPATEN	
	<i>Pengawas dan pengendalian dari keajaasan</i>									
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	135,135,000	Kab. Sumedang	100%	265,135,000	130,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
	<i>Belanja Jasa konsultasi</i>									
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Milik Daerah	Kab. Sumedang	100%	59,350,000	Kab. Sumedang	100%	109,350,000	50,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
	<i>Belanja Lembur</i>									
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan barang Milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Kab. Sumedang	100%	56,430,000	Kab. Sumedang	100%	256,430,000	200,000,000	APBD KABUPATEN	Tambahan Pagu
	<i>Kursus Singkat/Pelatihan</i>									
JUMLAH TOTAL				541,545,625,305			547,546,415,735	6,000,790,430		

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang harus memiliki rencana kerja yang dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional.

Sehubungan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis BKAD Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset di Kabupaten Sumedang sehingga indikator kinerja utama yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan, WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan penetapan APBD tepat waktu dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Namun demikian keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta masyarakat. Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini, diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Rencana kerja perubahan tahun 2022 merupakan rangkaian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 beserta jumlah pagu anggaran yang dibutuhkan. Apabila dalam perjalanan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran, maka akan dilaksanakan evaluasi agar kegiatan tetap dapat berjalan dengan anggaran yang tersedia namun tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja perubahan tahun 2022 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Seluruh unsur penyelenggara program perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda sebagaimana tertuang dalam rencana kerja ini.

Dengan demikian, diharapkan Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumedang di tahun mendatang.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, tanggapan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian, mudah-mudahan rencana kerja yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan harapan.

Sumedang, 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang



Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19690315 199901 2 001

Dengan demikian, diharapkan Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumedang di tahun mendatang.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, tanggapan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian, mudah-mudahan rencana kerja yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan harapan.

Sumedang, 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang



Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19690315 199901 2 001